

**BAB IV**  
**KERJA SAMA LUAR NEGERI KAMBOJA PADA MASA**  
**PEMERINTAHAN POL POT**

**A. Hubungan Regional Kamboja**

Bulan April 1975 merupakan babak baru bagi kehidupan rakyat Kamboja. Baik kehidupan dalam negeri, regional, maupun internasional. Kamboja yang semula menganut ideologi Barat berubah menjadi komunis radikal di bawah pemerintahan Pol Pot. Perubahan itu juga mempengaruhi hubungan Kamboja dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hubungan Kamboja dengan negara-negara Asia Tenggara semakin erat ketika Kamboja mulai menjalin hubungan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara tanpa terkecuali Indonesia yang selama ini telah terjalin.

Keterbukaan Kamboja terhadap Indonesia dimulai dengan diadirinya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung oleh Pangerang Sihanouk.<sup>1</sup> Sejak konferensi tersebut hubungan Indonesia dan Kamboja semakin erat dengan dimulainya hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja. Kerja sama itu tetap terjalin ketika Lon Nol mengambil alih kekuasaan di Kamboja.<sup>2</sup> Ditunjukkan dengan sikap Indonesia yang tetap mendukung Kamboja di bawah pemerintahan Lon Nol.

---

<sup>1</sup> Pangeran Sihanouk menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 April 1955. Konferensi tersebut merupakan cikal bakal berdirinya *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dikemudian hari.

<sup>2</sup> Nazaruddin Nasution, dkk, *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia Kamboja*, ( Jakarta: Metro Pos, 2002), hlm. 45.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik pada saat itu, berusaha untuk membantu Kamboja agar tetap pada posisi netral dalam menjalankan pemerintahan seperti yang dilakukan Sihanouk. Lon Nol bahkan meminta Indonesia untuk membantu menciptakan perdamaian di Kamboja.<sup>3</sup> Meskipun pada akhirnya politik yang dijalankan pemerintahan Lon Nol lebih condong ke Barat karena ia memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Namun Indonesia tetap menjalin hubungan baik terhadap Kamboja dengan tetap mempertahankan hubungan diplomatik yang selama ini terjalin.

Hubungan Indonesia-Kamboja mengalami pasang surut ketika Kamboja berada di bawah pemerintahan Pol Pot. Pemerintahan Pol Pot menutup diri dari dunia luar untuk menekan pengaruh asing di negaranya.<sup>4</sup> Kebijakan itu mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja yang telah dibina pada pemerintahan sebelumnya. Meskipun demikian Indonesia tetap berusaha membantu Kamboja untuk mewujudkan perdamaian di negara itu. Saat situasi semakin tidak terkendali, Lon Nol mengharapkan Indonesia dapat mengusahakan perdamaian bagi bangsa *Khmer* yang saling berperang.<sup>5</sup> Prioritas utama dari harapan tersebut agar Indonesia dan *Association of Southeast Asian Nations*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>4</sup> A. R. Sutopo, "Beberapa Segi Konflik Vietnam-Kamboja: Menuju Hegemoni Kawasan?", dalam *Analisa*, Tahun VII No. 2, Februari 1978, (Jakarta: CSIS, 1978), hlm. 93.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

(ASEAN) dapat mengajak Khmer Merah untuk mengadakan perundingan damai dengan pemerintahan Lon Nol.<sup>6</sup>

Perundingan damai yang diharapkan Lon Nol, Indonesia, dan negara-negara ASEAN tidak dapat terlaksana. Kegagalan itu dikarenakan pasukan Khmer Merah tidak bersedia untuk melakukan perundingan dan menginginkan mengambil alih pemerintahan. Kamboja semakin tidak aman untuk warga asing, sehingga semua warga asing diharuskan meninggalkan negara itu. Begitu juga dengan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Phnom Penh segera meninggalkan Kamboja.<sup>7</sup> Keputusan untuk meninggalkan Kamboja, diikuti oleh anggota negara ASEAN yang lain dan menutup kedutaan besar masing-masing negara.

Penutupan KBRI di Kamboja hanya sementara hal itu untuk menghindari korban jiwa yang mungkin terjadi. Indonesia tidak menarik staf KBRI ke Indonesia namun hanya memindahkan KBRI di Bangkok. Indonesia tetap memantau perkembangan dalam negeri Kamboja dan berusaha mencari jalan ke luar bersama negara-negara anggota ASEAN yang lain. Tahun 1978, Indonesia melakukan kunjungan ke Kamboja untuk membicarakan pengaktifan kembali KBRI di Phnom Penh.<sup>8</sup> Pertimbangan untuk mengaktifkan kembali KBRI

---

<sup>6</sup> ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 yang dipelopori oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Muangthai, dan Filipina.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

mengingat secara *de facto* Pemerintahan Pol Pot merupakan pemerintahan yang sah di Kamboja.

Rencana pengaktifan kembali KBRI di Kamboja mendapat sambutan baik dari Menteri Luar Negeri Kamboja, Ieng Sary. Sebelum rencana itu mendapat tanggapan, Kamboja terlibat konflik perbatasan dengan Vietnam. Konflik perbatasan Kamboja-Vietnam menimbulkan bentrokan senjata di kedua belah pihak, ajakan Vietnam untuk menyelesaikan masalah perbatasan tidak mendapat tanggapan dari Kamboja.<sup>9</sup> Sejak konflik perbatasan kembali bergolak di Kamboja, rencana Indonesia untuk membuka KBRI kembali menjadi tertunda.

Indonesia tidak dapat berbuat banyak mengenai kondisi Kamboja yang sedang bertikai dengan Vietnam. Indonesia dan negara-negara ASEAN menyadari bahwa konflik di Kamboja melibatkan negara-negara besar seperti Republik Rakyat Cina (RRC) dan Uni Soviet yang berebut pengaruh di Asia Tenggara.<sup>10</sup> Untuk itu Indonesia bersama Muangthai, Malaysia, Singapura, dan Filipina berusaha untuk meningkatkan kerja sama regional yang selama ini telah terjalin diantara negara anggota ASEAN. Mereka berusaha meningkatkan kerja sama di berbagai bidang seperti sosial, pertahanan, dan ekonomi untuk menekan pengaruh asing di Asia Tenggara.

Indonesia beserta negara ASEAN berusaha membantu Kamboja dan Vietnam untuk menyelesaikan masalah perbatasan secara damai. Semua pihak

---

<sup>9</sup> Ant, AP/AFP, "Divisi-Divisi Vietnam Serbu Wilayah Kamboja", *Sinar Harapan*, Selasa 3 Januari 1978, Tahun XVII No. 5293, hlm. I.

<sup>10</sup> AP, "ASEAN untuk Bendung Komunis", *Kompas*, Senin 28 Nopember 1977 No. 127 Tahun ke XIII, hlm. 1.

mengharapkan perdamaian dan stabilitas yang merupakan kondisi positif bagi pertumbuhan lembaga regional dan tidak menghendaki pertumpahan darah.<sup>11</sup> Dengan perdamaian maka stabilitas di Asia Tenggara akan tetap terjaga dan terciptanya kerja sama yang kuat di antara negara tersebut. Perdamaian antara Kamboja dan Vietnam tidak hanya harapan Indonesia namun semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki harapan yang sama.

Solidaritas Indonesia terhadap Kamboja tidak terlepas dari ancaman RRC bagi stabilitas regional Asia Tenggara.<sup>12</sup> Mengingat selama ini RRC banyak memberikan dukungan terhadap pemerintahan Pol Pot. Perdamaian yang diusulkan Indonesia juga bertujuan untuk tetap mempertahankan netralitas kawasan Asia Tenggara yang selama ini telah disepakati antar sesama anggota ASEAN. Meskipun pada akhirnya usaha perdamaian itu tidak terwujud pada masa pemerintahan Pol Pot. Kegagalan dikarenakan sikap pemerintahan Pol Pot yang tidak bersedia melakukan perundingan dengan Vietnam.<sup>13</sup>

Usaha ASEAN dan Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara khususnya Indochina belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Faktor penghambat usaha tersebut karena antara Kamboja dan Vietnam tidak ada yang mau mengalah. Terlebih Kamboja menjalankan politik yang tertutup bagi

---

<sup>11</sup> Robert A. Scalapino, *Economic, Political, and Security Issues in Southeast Asia in The 1980s*, a. b. Sophie Lie, *Asia Tenggara Dalam Tahun 1980-an*, (Jakarta: CSIS, 1985), hlm. 169.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>13</sup> PLO/AP, "Phnom Penh Bertekad Hancurkan Semua Pasukan Vietnam", *Sinar Harapan*, Rabu 4 Januari 1978, Tahun XVII No. 5293, hlm. IV.

negaranya sehingga tidak memungkinkan negara lain campur tangan mengenai urusan dalam negeri Kamboja. Walaupun demikian Indonesia dan negara ASEAN tidak pernah berhenti mengusahakan terciptanya perdamaian di kawasan Asia Tenggara khususnya konflik yang terjadi di Indochina.

Peranan Indonesia untuk menciptakan perdamaian di kawasan Indochina semakin terlihat setelah Kamboja terlepas dari rezim Pol Pot. Ditunjukkan dengan terpilihnya Indonesia sebagai *interlocutor* dalam penyelesaian masalah Kamboja.<sup>14</sup> Penunjukan tersebut merupakan pembuktian bahwa Indonesia memiliki kemampuan diplomasi di kancah internasional. ASEAN mempercayakan Indonesia untuk membantu penyelesaian secara damai mengenai masalah Kamboja dan Vietnam. Usaha untuk menciptakan perdamaian di Kamboja akhirnya dapat terlaksana meskipun membutuhkan waktu yang lama. Dan Kamboja resmi menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998.<sup>15</sup>

## **B. Kamboja Dalam Hubungan Internasional**

Hubungan diplomatik Kamboja dengan dunia internasional terputus sejak pemerintahan Pol Pot. Pol Pot menginginkan negara yang mandiri dan terbebas dari bantuan negara lain. Terlebih Pol Pot menganut ideologi komunis yang radikal sehingga tidak memiliki toleransi terhadap hal-hal yang mengancam terwujudnya revolusi untuk Kamboja. Namun Pol Pot tetap menjalin hubungan

---

<sup>14</sup> Nazaruddin Nasution, dkk, *op.cit.*, hlm. 104.

<sup>15</sup> Upacara penerimaan Kamboja sebagai anggota ASEAN berlangsung di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 April 1999. Lihat *Ibid*, hlm. 204.

diplomatik dengan beberapa negara seperti Cina, Vietnam, dan Swedia.<sup>16</sup> Hubungan dengan negara-negara tersebut tetap terjalin karena mereka memiliki ideologi yang sama yaitu komunis. Terlebih dengan Cina, pemerintahan Kamboja memiliki hubungan khusus mengingat Pol Pot banyak mengambil ide-ide revolusi yang berlaku di Cina.

Hubungan Kamboja-Cina semakin erat saat Pol Pot memerintah Kamboja. Mengingat saat Kamboja berada di bawah pemerintahan Lon Nol, Cina memberikan suaka politik bagi Pangeran Sihanouk dan Khmer Merah supaya membentuk pemerintahan di pengasingan guna menentang rezim Lon Nol. Cina memberikan dukungan terhadap pemerintahan Pol Pot sejak rezim ini berhasil mengambil alih kepemimpinan. Dukungan ditunjukkan dengan memberikan bantuan ekonomi dan militer bagi Kamboja.<sup>17</sup> Keputusan itu dilakukan untuk menekan pengaruh Uni Soviet di Indochina melalui pemerintahan Vietnam. Bantuan ekonomi dan militer bagi Kamboja diharapkan mampu menekan dominasi yang dilakukan Vietnam di kawasan Indochina. Walaupun pada saat itu Pemerintahan Pol Pot juga menjalin kerja sama dengan Vietnam sebagai sesama negara komunis.

Kerja sama yang harmonis antara Kamboja dan Vietnam menjadi konflik hebat ketika kedua negara berebut daerah perbatasan. Konflik tersebut membuat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>17</sup> Michael Vickery, *Cambodia*, in Douglas Allen and Ngo Vinh Long, *Coming to Term; Indochina, the United States and the War*. (United Kingdom: Westview Press, 1991), hlm. 104.

Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dengan Vietnam.<sup>18</sup> Indochina menjadi daerah yang rawan peperangan jika kedua negara tidak mau berdamai dan saling melakukan provokasi. Provokasi antar kedua negara menjadi pertempuran yang semakin meningkat di awal tahun 1978.<sup>19</sup> Sesama negara komunis, mereka tidak mampu meredam perselisihan perbatasan yang dipermasalahkan kedua negara. Mereka saling mengangkat senjata untuk mempertahankan wilayah negara masing-masing.

Kebijakan pemerintah Kamboja untuk menutup diri dari dunia internasional tidak menutup keterlibatan dunia internasional terhadap konflik Kamboja. Apalagi ketika masyarakat internasional menyadari bahwa perkembangan Kamboja akibat konflik kepentingan dan pengaruh antara RRC dan Vietnam sebagai perluasan persaingan Cina-Soviet.<sup>20</sup> Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara khususnya Indochina, ASEAN berusaha mencari penyelesaian masalah Kamboja-Vietnam melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara membentuk *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)* sebagai usaha untuk menghindari persaingan dan keterlibatan kekuatan-kekuatan asing di

---

<sup>18</sup> Ant, AP/AFP, *op.cit.*, hlm. XI.

<sup>19</sup> A. R. Sutopo, *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>20</sup> Adam Malik, "Masalah Kampuchea: Retrospek dan Prospek", dalam *Analisa*, Tahun XIII, No. 4, April 1984, (Jakarta: CSIS, 1978), hlm. 300.

wilayah ini.<sup>21</sup> ASEAN berharap bahwa negara-negara di Asia Tenggara dapat hidup dengan damai secara berdampingan dengan tetangga barunya, yaitu munculnya Vietnam dan Kamboja sebagai negara komunis 1975. Harapan itu seakan musnah ketika Kamboja dan Vietnam kembali terlibat konflik. Kamboja semakin menaruh kebencian terhadap Vietnam ketika Vietnam melakukan serangan di kota-kota Kamboja seperti Memot, Kutum, Krech, dan Trapeang Phlong (peta daerah yang dikuasai Vietnam lihat lampiran 2 halaman 92).<sup>22</sup> Serangan itu membuat Kamboja tidak ingin membicarakan perdamaian dengan Vietnam.

Konflik Kamboja-Vietnam yang tidak kunjung mereda mengancam stabilitas internasional dan kawasan Asia Tenggara khususnya. Konflik tersebut menjadi perhatian internasional karena melibatkan dua negara besar RRC dan Uni Soviet.<sup>23</sup> Kedua negara saling berebut pengaruh di kawasan Asia Tenggara melalui konflik Kamboja-Vietnam. Persaingan itu telah mengancam masa depan dan hubungan antara negara komunis di Indochina yaitu Kamboja dan Vietnam. Organisasi internasional seperti PBB merasa terpanggil untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik karena konflik dua kekuatan itu dapat mengancam perdamaian dunia.

---

<sup>21</sup> Robert A. Scalapino, *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>22</sup> Ant, AP/AFP, *loc.cit.*

<sup>23</sup> Hilman Adil, "Asia-Pacific and The Conflict in Kampuchea", dalam *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial*, Tahun ke IX No. 2, 1982, hlm. 230.

PBB sebagai organisasi dunia yang mengusahakan perdamaian menghimbau kepada kedua negara untuk melakukan perundingan. Usaha PBB untuk melakukan perundingan sepertinya sia-sia belaka karena antar negara yang bertikai tidak ingin menurunkan senjata. Kamboja mulai melintasi garis perbatasan dan Vietnam Utara mulai menguasai wilayah delta Mekong (berita pertempuran Kamboja-Vietnam lihat lampiran 20 halaman 110).<sup>24</sup> Pertempuran antar kedua negara tidak dapat diredamkan kembali meskipun berbagai pendekatan perundingan telah diusahakan oleh lembaga internasional. Masing-masing negara beranggapan paling benar sehingga tidak tercapai kata sepakat diantara keduanya.

Perundingan sempat dibicarakan oleh kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil. Kamboja tetap teguh pada pendiriannya untuk melawan Vietnam melalui jalan peperangan. Politik mengangkat senjata yang dilakukan Pol Pot dianggap sebuah kesalahan yang memancing aksi militer lawan yang jelas superior.<sup>25</sup> Dilihat dari jumlah pasukan, Vietnam memiliki pasukan yang lebih siap untuk melakukan pertempuran daripada Kamboja. Mengingat kondisi dalam negeri Kamboja pada tahun 1978 mengalami banyak masalah seperti kekurangan bahan pangan dan banyaknya penduduk yang tewas akibat kebijakan pemerintah.

Serangan balasan yang dilakukan Vietnam dibantah bahwa negaranya melancarkan perang terhadap Kamboja. Serangan tersebut merupakan bentuk

---

<sup>24</sup> AFP, "Pertempuran Vietnam-Kamboja Masih Terus", *Kompas*, Rabu 28 September 1977 No. 76 Tahun ke XIII, hlm. 1.

<sup>25</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Asia Tenggara dalam Perspektif Netralitas dan Netralisme*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 73.

pembalasan karena Kamboja telah menyerang front sepanjang 140 km, membunuh 1.000 penduduk sipil, dan membakar 1.000 rumah di wilayah Vietnam (surat kabar yang membahas masalah itu lihat lampiran 21 halaman 111).<sup>26</sup> Saling serang tersebut yang membuat perdamaian seakan tidak mungkin terjadi. Peperangan antar kedua negara sebenarnya tidak akan terjadi jika kedua negara tidak mendapat dukungan dari sekutu masing-masing.

Vietnam tidak akan melakukan invasi ke Kamboja tanpa bantuan Uni Soviet karena Vietnam berada dalam kesulitan ekonomi pada saat itu.<sup>27</sup> Bantuan yang diberikan Uni Soviet tidak terlepas dari tujuan Uni Soviet untuk mengembangkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indochina.<sup>28</sup> Adanya bantuan-bantuan tersebut yang membuat perang di Indochina tidak kunjung reda dan menimbulkan kekhawatiran dunia internasional dan Asia Tenggara khususnya. Negara-negara Asia Tenggara tidak berhenti untuk tetap mengusahakan perdamaian di kawasan Indochina melalui perdamaian.

Usaha negara-negara ASEAN menunjukkan hasil ketika Kamboja dan Vietnam mulai menghentikan peperangan. Penghentian peperangan dilakukan karena Uni Soviet dan RRC telah menghentikan bantuan logistik kepada kedua

---

<sup>26</sup> AFP, "Paruh Kakatua Seluruhnya Dikuasai Pasukan Vietnam", *Sinar Harapan*, Kamis 5 Januari 1978 Tahun XVII No. 5293, hlm. IV.

<sup>27</sup> Robert A. Scalapino, *op.cit.*, hlm. 9.

<sup>28</sup> Tujuan Uni Soviet antara lain: menjalankan politik pembendungan RRC dari selatan; memperluas pengaruhnya di seluruh Asia Tenggara; dan meneruskan peranannya sebagai bankir dan pemasok senjata militer kepada mesin perang yang paling ampuh di seluruh Asia Tenggara.

belah pihak dalam konflik Kamboja.<sup>29</sup> Meskipun pasukan dari kedua negara tidak semuanya ditarik ke daerah masing-masing. Perkembangan itu memberikan harapan bagi terwujudnya perdamaian di Indochina. Dewan perdamaian dunia yang didukung oleh Uni Soviet mengeluarkan sebuah pernyataan mendukung seruan Vietnam untuk mengadakan perundingan, namun Kamboja menolak.<sup>30</sup> Kamboja menghendaki agar seluruh pasukan ditarik mundur dari wilayahnya sebelum mengadakan perundingan.

Pertempuran antara Kamboja dan Vietnam akhirnya berakhir ketika rezim Pol Pot berhasil digulingkan oleh Heng Samrin<sup>31</sup> yang dibantu Vietnam.<sup>32</sup> Berakhirnya rezim Pol Pot mengakhiri pertempuran antar Kamboja dan Vietnam yang selama ini terjadi. Pemerintahan yang baru langsung mendapat dukungan dari Vietnam. Dukungan Vietnam terhadap Heng Samrin mendapat reaksi keras dari negara-negara ASEAN.<sup>33</sup> Tindakan yang dilakukan Vietnam dianggap sebagai tindakan agresi terhadap negara lain dan tidak dapat dibenarkan. Hal itu

---

<sup>29</sup> Ant, AFP/KNI/AP, "Pertempuran Vietnam-Kamboja Mengendur", *Sinar Harapan*, Senin 9 Januari 1978 Tahun XVII No. 5293, hlm. IV.

<sup>30</sup> AFP, "Situasi Kamboja-Vietnam Berkembang Sangat Serius", *Sinar Harapan*, Kamis 5 Januari 1978 Tahun XVII No. 5293, hlm. IV.

<sup>31</sup> Heng Samrin adalah pemimpin komunis Kamboja yang tidak sejalan dengan Pol Pot. Ia menjadi terkenal di dunia ketika 1979 menggulingkan pemerintahan Pol Pot yang dibantu oleh Vietnam. Selanjutnya ia menjabat sebagai presiden setelah rezim Pol Pot tidak berkuasa di Kamboja, meskipun kepemimpinannya tidak diakui dunia internasional.

<sup>32</sup> Michael Vickery, *op.cit.*, hlm. 107.

<sup>33</sup> Nazaruddin Nasution, *dkk, op.cit.*, hlm. 95.

juga selaras dengan pendapat PBB bahwa apa yang dilakukan Vietnam merupakan pelanggaran terhadap hak kedaulatan negara lain.

PBB tidak mengakui Heng Samrin sebagai pemimpin baru Kamboja dan tetap menganggap Pol Pot sebagai kepala negara Kamboja yang sah.<sup>34</sup> Dunia internasional mengecam tindakan Vietnam dan meminta Vietnam untuk menarik semua pasukannya dari wilayah Kamboja. ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara meminta PBB untuk membicarakan masalah Indochina serta mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah guna memulihkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Indochina.<sup>35</sup> Usaha tersebut membuahkan hasil dan Vietnam bersedia menarik pasukannya dari wilayah Kamboja. Pasukan perdamaian pun disiagakan di Kamboja untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi.

Berakhirnya peperangan antara Kamboja dan Vietnam secara tidak langsung menandai berakhirnya pemerintahan Pol Pot di Kamboja. ASEAN dan dunia internasional akan membantu PBB dalam memulihkan kondisi dalam negeri Kamboja pasca perang dengan Vietnam. Tidak hanya itu, pemulihan pasca pemerintahan Pol Pot yang radikal juga mendapat perhatian yang serius dari dunia internasional melalui PBB. PBB memberikan bantuan berupa suplai makanan

---

<sup>34</sup> Windy Afiyanti, *The Mass Killers of The Twentieth Century*, (Yogyakarta: Narasi, 2006), hlm. 203.

<sup>35</sup> Nazaruddin Nasution, dkk, *op.cit.*, hlm 98.

terhadap masyarakat Kamboja diawal tahun 1980an.<sup>36</sup> Awal tahun 1980an Komboja mulai berbenah diri dari kekacauan yang selama ini dialami.

Pemulihan kondisi Kamboja tidak terlepas dari pengawasan dan bantuan dunia internasional dan negara-negara tetangga. Rakyat Kamboja berharap dengan pengawasan dan bantuan dari dunia internasional kondisi Kamboja menjadi lebih baik. Kekacauan yang terjadi di negara mereka dapat diselesaikan dengan jalan damai. Mereka juga berharap masalah perbatasan serta dominasi asing di kawasan Indochina dapat diselesaikan. Sehingga rakyat Kamboja dapat menentukan nasib mereka sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Agar rakyat Kamboja dapat memperoleh kehidupan yang layak sebagai warga negara maupun sebagai manusia merdeka.

---

<sup>36</sup> Windy Afiyanti, *loc.cit.*